

GERAKAN PEMOGOKAN BURUH PASCA ORDE BARU (Studi Kasus di PG Djatiroto Kabupaten Lumajang)

*The Worker's Strike Movement Post New Order:
(A Case Study on Djatiroto Sugar Plant in Lumajang)*

Sumarjono¹, Heru Nugroho², dan Dafri Agussalim²

*Program Studi Ketahanan Nasional
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

ABSTRACT

The purpose of this research is to study and describe the worker conflict and strike movement Post New Order in Djatiroto sugar plant in Lumajang, East Java. This research tries to analyze three basic problems. First: to analyze the reasons why the workers are on strike. Second, why the worker's strike event occurred and the third, analyzing the impact of workers' strike on social environment around Djatiroto sugar plant. The research is done by using qualitative descriptive method.

The research finds that the strike movement is driven by internal and external factors. The internal factor is the right conflict and the unequal relationship between workers and the master. This is a *basic conflict* that always persistent in a sugar plant and resulted from the unequal Pancasila industry relationship. The external factor refers to condition that has relation with government's political economy policy, especially towards the industry and the union. The eleven days of strike movement in Djatiroto sugar plant triggered by PHL (*premi hasil lebih*) went on peacefully. The conflict settlement through formal line (bipartit, and tripartit negotiation) did not work. On the contrary, the political settlement involved Bupati and DPRD (local parliament) in Kabupaten Lumajang. The strike movement had no a negative effect for the stability on social environment around Djatiroto sugar plant.

Key word: *Worker's strike -- Post New Order.*

1. Alumni Program Studi Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

PENGANTAR

Latar Belakang

Sepuluh tahun terakhir ini aksi unjuk rasa dan pemogokan buruh di Indonesia meningkat tajam (Djati, 2000:123). Salah satunya adalah kasus gerakan pemogokan buruh di PG Djatiroto Kabupaten Lumajang Jawa Timur pada tahun 1999 yang berlangsung selama sebelas hari (Radar Lumajang, tanggal 9 September 1999:14; tanggal 20 September 1999:1). Peristiwa aksi pemogokan buruh tidak bisa hanya ditinjau dari segi buruh menuntut upah dan perbaikan kesejahteraannya saja, tetapi harus dilihat secara komprehensif. Hal ini disebabkan persoalan perburuhan di Indonesia amat kompleks dan dilematis, dan sulit untuk dipecahkan.

Timbulnya berbagai persoalan buruh di atas selain disebabkan oleh perselisihan perburuhan (Soepomo, 1992:96) dan *basic conflict* (Scott, dalam Parker dkk, 1992:201), juga berkaitan erat dengan politik perburuhan dan hubungan industrial pada masa pemerintah Orde Baru (Sudjana, 2000:8). Kontrol yang efektif pemerintah terhadap buruh mengakibatkan resistansi dalam berbagai segi kehidupannya rendah (Wibawanto, 1998:130). Posisi dan kekuatan buruh menjadi lemah, bahkan dalam banyak hal menjadi tidak berdaya. Buruh mengalami *dehumanisasi* dan keterasingan, bekerja dalam bayang-bayang represi dan ketakutan, sehingga kesadaran kolektifnya tereduksi dalam kesadaran hamba yang patuh dan menerima fasilitas apa adanya. Permasalahan perburuhan lainnya yang langsung dirasakan oleh buruh adalah menyangkut kehidupan sosial ekonomi akibat dari upah yang mereka terima tidak imbang dengan lajunya kenaikan harga berbagai kebutuhan, terutama sejak timbulnya multi krisis sejak akhir tahun 1997 menjadikan kehidupan buruh semakin tertekan. Oleh karena itu, meletusnya reformasi dan berakhirnya rejim Orde Baru digunakan sebagai kesempatan bagi buruh untuk mengadakan berbagai gerakan perbaikan kondisi kehidupannya.

Masalah Penelitian

Meskipun persoalan perburuhan cukup kompleks dan rawan konflik, dalam arti potensi aksi unjuk rasa dan mogok kerja tinggi, namun pada masa Orde Baru persoalan tersebut tidak sampai mencuat kepermukaan, termasuk kondisi perburuhan dan hubungan industrial di PG Djatiroto (tergolong rawan konflik). Akan tetapi mengapa baru pasca Orde Baru (setelah ada reformasi) perselisihan perburuhan di PG Djatiroto mengemuka dan serius, sehingga terjadi gerakan mogok kerja? Secara

rinci persoalan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa saja penyebab timbulnya gerakan pemogokan buruh PG Djatiroto?; 2) Mengapa di PG Djatiroto terjadi peristiwa gerakan pemogokan buruh?; dan 3) Bagaimana implikasi aksi mogok kerja buruh PG Djatiroto terhadap ekologi sosial masyarakat di sekitar luar pabrik?

Kerangka Teori

Fenomena konflik sosial pada dasarnya merupakan *biopsikologis* yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Konflik dalam masyarakat industri menurut Marx dan Weber dipandang sebagai kausa prima ketidaksetaraan sosial dan aliansi hubungan industrial antara kelas kapitalus (borjuis) dan kelas proletar (buruh) (Zeitlin, 1995:21-25). Susetawan juga menegaskan bahwa hubungan sosial antara borjuis dan proletar bermuatan konflik fundamental, karena hubungan mereka merupakan hubungan sepihak dan eksploitatif (2000:11). Dengan demikian jelas bahwa konflik sosial dalam masyarakat industri merupakan perwujudan dari perselisihan hak dan kepentingan. Soepomo (1992:96-97) membedakan perselisihan menjadi dua, yaitu perselisihan kepentingan (*belangengeschild*) dan perselisihan hak (*rechtengeschild*).

Persoalan penting dalam memahami konflik adalah upaya mengidentifikasi konflik, faktor-faktor penyebabnya dan penyelesaian konflik serta implikasinya. Menurut Soepomo (1992:96) konflik atau perselisihan perburuhan disebabkan oleh ketidaksesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, kondisi perburuhan dan terjadinya pelanggaran perjanjian perburuhan atau pelanggaran hukum oleh pihak-pihak tertentu. Marx juga menjelaskan, bahwa salah satu penyebab konflik dalam masyarakat industri karena terjadi kesenjangan antara kaum borjuis dan proletar. Kemajuan industri semakin memperkaya golongan borjuis (sebagai penguasa sumber daya produksi), tetapi golongan proletar tetap miskin (dalam Hariyanto, 1991: 53-54). Kesenjangan dalam masyarakat industri akibat hubungan yang tidak setara antara borjuis dan proletar sehingga menimbulkan *industrial conflict* ini oleh Marx disebut dengan *basic conflict*. Sumber konflik karena ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi/produksi. Konflik muncul karena adanya upaya memperoleh akses produksi material yang dapat menopang kehidupan sosial ekonominya (Sudarsono, 1995:49-51). *Basic conflict* bisa menguat pada saat mendapat pengaruh eksternal (politik, sosial, ekonomi global), sehingga dalam tingkatan tertentu bisa berkembang dan menjadi aktual.

Menurut Kent (1993:375) pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bisa bersifat individu, suatu entitas, organisasi agen. Berkenaan dengan hal itu, Gurr dalam konsep *relative deprivation* mengapresiasi, bahwa konflik terjadi ketika dalam suatu masyarakat timbul kesenjangan antara "nilai yang diharapkan" dengan "nilai kapabilitas" untuk mencapai harapan. Akibatnya masyarakat yang bersangkutan mengalami kekecewaan atau frustrasi yang pada gilirannya dapat memunculkan tindakan melawan atau memberontak. Semakin tajam kesenjangan dan kekecewaan yang terjadi, semakin besar pula kemungkinan munculnya tindakan melawan atau memberontak (1970:45-55). Tindakan melawan atau memberontak tersebut dapat dikategorikan ke dalam gerakan sosial (Cook dan Hous dalam Zeitlin, 1995:76). Secara teoritis, dinamika konflik (termasuk konflik perburuhan) dapat dipaparkan, bahwa jika wujud konflik masih dalam kadar yang relatif rendah dan masih bisa ditolelir, penyelesaiannya tidak sulit. Namun jika konflik sudah mencapai tingkat yang relatif gawat sehingga sulit dikendalikan, maka konflik dapat menimbulkan kekerasan, bahkan bisa terjadinya disintegrasi (Hariyanto, 1991:52).

Di dalam fenomena konflik terdapat aktualisasi isu sentral masalah yang dipertentangkan. Konflik mempunyai akar persoalan yang bersumber dari faktor internal dan eksternal, sehingga konflik dapat terjadi secara cepat. Berdasarkan konsep analisis siklus konflik Kriesberg (1982:19) konflik terjadi mulai dari tahap awal, selanjutnya meningkat hingga mencapai tingkat tinggi, kemudian mengalami penurunan dan berakhir. Berakhirnya konflik dapat membuahkan hasil yang membuat konflik berhenti sama sekali, atau hasilnya justru berupa sesuatu yang menjadi penyebab munculnya konflik baru.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan: 1) mengkaji dan mengidentifikasi penyebab timbulnya gerakan pemogokan buruh PG Djatiroto; 2) mengadakan studi peristiwa aksi mogok kerja buruh PG Djatirito; dan 3) mengkaji implikasi aksi mogok kerja buruh PG Djariroto terhadap ekologi sosial masyarakat di sekitar luar parik.

CARA PENELITIAN

Pengkajian persoalan di atas dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Koentjoroningrat (1981: 42) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab persoalan yang sedang dikaji. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran tentang

sesuatu peristiwa atau keadaan secara obyektif dalam bentuk deskripsi situasi tertentu, yang dilakukan dengan menempuh langkah-langkah: pengumpulan data, klasifikasi serta analisis atau pengolahan data. Menurut Singarimbun (1989:4-5) penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Obyek dan sasaran kegiatan penelitian ini adalah implementasi hubungan perburuhan di PG Djatiroto yang sasaran dikonsentrasikan pada tiga obyek, yaitu: 1) pihak pimpinan pengelola perusahaan khususnya ADM (Administratur); 2) pihak buruh PG Dja-tiroto; 3) masyarakat di sekitar/luar pabrik yang secara sosial ekonomi terkena dampak dari aktivitas proses produksi PG Djatiroto dan pemogokan buruh. Data kualitatif yang dipergunakan diperoleh dari sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan *survey* langsung terhadap sasaran penelitian berdasarkan panduan wawancara. Sumber data sekunder diperoleh dari informasi lisan maupun tertulis seperti kajian dokumentasi dari instansi terkait, media massa dan lembaga-lembaga yang terkait dengan permasalahan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Temuan hasil penelitian menunjukkan, bahwa aksi mogok kerja buruh PG Djatiroto selama sebelas hari merupakan perselisihan hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh kedua belah pihak. Gerakan pemogokan buruh disebabkan oleh faktor *internal* dan *eksternal*. Faktor *internal* terdiri atas: 1) perselisihan hak, yaitu perselisihan perburuhan karena pelanggaran hak buruh oleh pihak manajemen (ADM), terutama tentang pemberian THR (tunjangan hari raya), pembagian premi hasil lebih (PHL) musim giling tahun 1998; 2) *Basic conflict*, merupakan perbedaan kepentingan antara buruh dengan pihak manajemen perusahaan akibat ketidaksetaraan hubungan industrial yang selalu melekat dalam masyarakat industri gula. *Basic conflict* diperkuat oleh kondisi sosiokultural warisan kolonial Belanda, sehingga makin mempertajam perbedaan status sosial ekonomi antara karyawan staf (manajemen) dengan karyawan pelaksana (buruh). *Basic conflict* sebagai akumulasi ketidaksetaraan HIP (Hubungan Industrial Pancasila) inilah yang menjadi pemicu timbulnya aksi mogok kerja buruh PG Djatiroto bulan September 1999.

Faktor *eksternal* merupakan kondisi yang berkaitan erat dengan

kebijakan politik ekonomi pemerintah, khususnya dalam sektor industri dan perburuhan. Faktor *eksternal*, dimasukdkan sebagai kebijakan politik pemerintah Orde Baru baik makro maupun mikro. Kebijakan makro menyangkut politik ekonomi nasional yang berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat kelas bawah termasuk buruh. Kebijakan mikro berkenaan dengan politik perburuhan dalam rangka industrialisasi melalui konsep HIP. Berdasarkan konsep HIP, pihak pemerintah seharusnya melakukan perlindungan buruh, ternyata justru bersikap represif terhadap kehidupan buruh. Timbulnya multi krisis dan gerakan reformasi pasca Orde Baru sangat berpengaruh juga terhadap dinamika kehidupan buruh. Terbukanya kran demokratisasi dan kebebasan, dianggap sebagai peluang bagi buruh PG Djatiroto untuk memperjuangkan perbaikan kondisi sosial ekonominya.

Aksi mogok kerja buruh PG Djatiroto berlangsung selama sebelas hari secara terus menerus (24 jam), dilaksanakan secara bergantian atau bergilir dan dalam kondisi damai, artinya tidak terjadi konflik fisik. Isu sentral kasus konflik perburuhan ini adalah tuntutan pelanggaran hak dan keadilan. Aksi mogok kerja buruh PG Djatiroto dipicu oleh kasus pembagian PHL. Upaya penyelesaian perselisihan dengan musyawarah yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum terjadi pemogokan tidak mampu mengatasi persoalan. Sementara penyelesaian melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) tidak bisa dilakukan, karena pemogokan tidak menggunakan bendera (mengatasnamakan serikat pekerja). Bahkan sebelumnya buruh tidak memberitahukan lebih dulu rencana aksi mogok kepada pihak-pihak terkait. Ironisnya, penyelesaian konflik hubungan industrial ini justru lebih berhasil dipecahkan melalui jalur politik, yaitu berkat campur tangan Bupati dan DPRD Kabupaten Lumajang, meskipun hingga kini belum terselesaikan secara tuntas.

Peristiwa aksi mogok kerja buruh PG Djatiroto berimplikasi terhadap kelangsungan produksi dan buruh maupun masyarakat sekitar pabrik, meskipun tidak begitu serius. Dampak aksi pemogokan bagi PG adalah kerugian materi cukup besar. Hal ini disebabkan oleh terhentinya aktifitas giling tahun 1998 yang kurang dua bulan lagi dan kerusakan mesin instalasi giling karena terjadinya pembekuan air nira. Akibatnya pemogokan, PG Djatiroto mengalami kerugian materi Rp. 50.500.000.000,00. Sedangkan di pihak buruh mengalami kerugian materi akibat selama mogok tidak diberi upah dan uang lembur. Namun secara sosial buruh telah menunjukkan eksistensinya dalam usaha memperjuangkan perbaikan kondisi hidup. Bagi masyarakat luar PG, tidak ada indikasi yang menunjukkan timbulnya kerawanan bagi stabilitas

ekologi sosial masyarakat di sekitar/ luar PG Djatiroto. Kondisi keamanan sosial masyarakat *internal* maupun *eksternal* sekitar PG Djatiroto tetap dalam keadaan kondusif, kecuali bagi petani tebu dan pengusaha angkutan tebu yang melakukan protes karena merasa dirugikan.

KESIMPULAN

Aksi mogok kerja karyawan PG Djatiroto bulan September 1999 disebabkan oleh endapan akumulasi faktor *internal*, yaitu perselisihan hak antara buruh dengan pengelola PG dan *eksternal*, politik ekonomi dan politik perburuhan. Akumulasi endapan persoalan perburuhan tersebut kemudian mencuat kepermukaan yang kemudian menjadi isu aktual ketika kran keterbukaan dan kebebasan dibuka oleh gerakan reformasi. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan gerakan reformasi mengakibatkan kontrol dan pengendalian terhadap buruh mulai mencair. Perubahan suasana tersebut oleh buruh dipandang sebagai kesempatan bagi buruh untuk memperbaiki berbagai kondisi kehidupannya. Akibatnya timbul benturan antara pihak manajemen (ADM) dengan buruh sehingga terjadi aksi kekerasan (pemogokan).

Gerakan mogok kerja buruh PG Djatiroto berlangsung sebelas hari dipicu oleh kasus pembayaran bonus insentif per triwulan dan pembagian PHL tahun 1998, yang menurut buruh tidak sesuai dengan aturan. Penyelesaian melalui musyawarah antara kedua belah pihak tidak menghasilkan kesepakatan. Sedangkan penyelesaian dengan melibatkan P4D tidak bisa dilakukan karena pemogokan tidak menggunakan bendera organisasi serikat pekerja. Pemogokan justru berhasil dihentikan melalui penyelesaian lewat jalur politik meskipun masih belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor sebagai berikut: 1) situasi dan kondisi kultur kerja PG Djatiroto masih cukup diwarnai oleh kultur feodal, otoriter dan represif; 2) pengawasan implementasi HIP dan perlindungan terhadap buruh dari pemerintah lemah; 3) serikat pekerja sangat lemah sehingga tidak mampu menyalurkan aspirasi buruh; 4). nilai tawar buruh sangat rendah.

Aksi mogok kerja buruh, PG Djatiroto menderita kerugian materi cukup besar. Sedangkan di pihak buruh tidak mendapat upah dan uang lembur. Dari segi sosial, buruh telah menunjukkan eksistensinya dalam memperjuangkan perbaikan kondisi kehidupannya. Selain itu juga tidak ditemukan indikasi kerawanan sosial masyarakat akibat konflik industrial PG Djatiroto, baik secara makro maupun mikro. Kegiatan berbagai sektor kehidupan masyarakat sekitar PG baik selama dan sesudah aksi mogok kerja tetap berlangsung seperti biasa dan tidak ada pengaruh

yang berarti, kecuali ada satu TK dan satu SD terdekat dengan lokasi pemogokan terpaksa dipulangkan lebih awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Djati, Aroef, W. 2000. "Krisis Perburuhan di Jawatimur", dalam *Gerbang*. No: 08, Volume 03. Surabaya: Elsad dan Taf.
- Gurr, Ted Robert. 1970. *Why Men Rebel*. New Jercey: Princenton University.
- Hariyanto. 1991. *Elit, Massa, dan Konflik*. PAU-Studi Sosial, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Kent, George. 1993. "Analyzing Conflict and Violence". Dalam *Jurnal Peace & Change*, No: 4, Vol. 18, Council on Peace Research in History and Consortium on Peace Research, Education and Development, Ttp.
- Kriesberg, Louis. 1982. *Social Conflicts*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
- Parker, S.R., dkk. 1992. *Sosiologi Industri*. (Terj), Jakarta: Rineka Cipta.
- Radar Lumajang. 1999. "Ribuan Karyawan PG Djatiroto Unjukrasa." dalam *Radar Lumajang*, Surabaya: Jawa Post, tanggal 9 September 1999.
- _____. 1999. "Buruh PG Djatiroto Tuntut PHL Lewat Hukum", dalam *Radar Lumajang*. Surabaya: Jawa Post, tanggal 20 September 1999.
- Soepomo, Imam. 1992. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Jambatan.
- Sudarsono, Stepen, K. 1995. *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Eggi. 2000. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*. Yogyakarta: PPML.
- Wibawanto, Agus, dkk. 1998 *Siasat Buruh Dibawah Represi*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Zeitlin, Irving, M. 1995. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.